

ABSTRAK

Rahanita Devi Arianty. 2026. Kajian Yuridis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. Pembimbing (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

Sekstorsi merupakan kejahatan seksual berbasis digital yang menggunakan ancaman penyebaran konten intim sebagai alat pemerasan atau pengendalian terhadap korban. Kejahatan ini semakin marak terjadi di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, pengaturannya dalam hukum positif Indonesia belum bersifat eksplisit dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan sekstorsi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS tidak menyebut istilah sekstorsi secara eksplisit, unsur-unsur tindak pidana sekstorsi dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf I, Pasal 14, dan Pasal 15 UU TPKS. Namun demikian, inkonsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum masih terjadi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN.Pdg yang menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alih-alih UU TPKS sebagai dasar penuntutan. Kebijakan hukum pidana yang ideal (*de lege ferenda*) memerlukan reformasi delik sekstorsi secara eksplisit dalam UU TPKS, disertai sanksi pidana yang lebih tegas dan komprehensif, sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 5* (lima) dan *Goal 16* (enam belas) tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

Kata kunci: Sekstorsi, Kebijakan Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, *De Lege ferenda*

ABSTRACT

Rahanita Devi Arianty. 2026. *Juridical Analysis of Criminal Law Policy Regarding the Crime of Sextortion under Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence*. Thesis. Law Study Program, Faculty of Law, PGRI Madiun University. Supervisor (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. Co Advisor (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

Sextortion is a digital-based sexual crime that uses the threat of disseminating intimate content as a tool of extortion or control over victims. This crime has become increasingly prevalent in Indonesia along with the rapid development of information and communication technology. However, its regulation under Indonesian positive law has not been explicit and comprehensive. This study aims to examine the criminal law policy on the crime of sextortion under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS), as well as to formulate an ideal criminal law policy for addressing sextortion in the future. This study employs a normative juridical, prescriptive research metode with three approach. The legal materials used consist of primaary, secondary, and tertiary legal material. Analyzed qualitatively. The result show that although UU TPKS does not explicitly mention the term “sextortion”, the elements of the crime of sextortion can be found in Article 4 paragraph (1) letter 1, Article 14, and Article 15 of UU TPKS. Nevertheless, inconsistencies in its application by law enforcement officers still occur, as reflected in Padang District Court Decision Number 964/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, which applied the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) instead of UU TPKS as the basis for prosecution. An ideal criminal law policy (de lege ferenda) requires aan explicit reform of the sextortion offense within UU TPKS, accompanied by firmer and more comprehensive criminal sanctions, as a manifestation if Indonesia’s commitment to achieving Suistanable Development Goals (SDGs) Goal 5 and Goal 16 concerning peaace, justice, aand strong institutions.

Keywords: *Sextortion, Criminal Law Policy, Sexual Violence Crimes Law, Electronic-Based Sexual Violence, De Lege Ferenda*